

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara berkembang, dalam mewujudkan kemakmuran serta mensejahterakan rakyat memberikan perhatian pada pembangunan ekonomi. Ekonomi merupakan aspek penting yang dapat menunjang kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menumbuhkan dan memajukan sektor ekonomi baik sektor formal maupun informal. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah karena diharapkan dengan menguatnya perekonomian daerah maka akan menguatkan perekonomian nasional.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah pasar tradisional. Pasar tradisional sebagai lokasi perdagangan merupakan pilar perekonomian. Melalui berbagai fungsi dan peran strategis yang dimiliki, pasar tradisional menjadi salah satu wadah atau sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pasar tradisional berperan penting dalam menjaga perekonomian sektor riil paling bawah di negeri ini. Peran pasar tradisional melalui para pelaku ekonomi mikro tersebut setidaknya telah menjadikan Indonesia terhindar dari krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008-2009 dan krisis global yang melanda Eropa beberapa waktu lalu. Konsumsi masyarakat yang dibelanjakan di dalam negeri menjadi kekuatan yang cukup besar meskipun nilai ekspor

mengalami penurunan. Saat ini pasar tradisional menjadi wadah untuk produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah kecil atau mikro yang sebagian besar merupakan produk hasil pertanian.( Adri Poesoro, “Pasar Tradisional di Era Persaingan Global”, *Newsletter Lembaga Penelitian Smeru No. 22: Apr-Jun/2007*, hlm. 3)

Pasar tradisional mempunyai peran strategis pula dalam penyerapan tenaga kerja, Survey yang dilakukan BPS Indonesia pada tahun 2014 menunjukkan bahwa sektor ritel mampu menyerap 24,8 juta tenaga kerja atau sekitar 21,6 % dari total tenaga kerja Indonesia. Dengan jumlah tersebut, penyerapan tenaga kerja di sektor ritel menempati urutan kedua setelah sektor pertanian yang menampung 38,9 juta tenaga kerja atau sekitar 33,9% dari tenaga kerja Indonesia.( Iis Nurlaela, “*Analisis Efektifitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Bulu Kota Semarang*”.2017)

Pasar tradisional tidak hanya berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja juga memberikan kesempatan yang luas bagi para petani sebagai produsen untuk memperoleh pendapatan dari hasil pertaniannya baik dengan memasarkan produknya secara langsung di pasar tradisional maupun melalui perantara pemasok atau agen. Pada akhirnya pasar tradisional memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya baik produsen, pedagang, pemasok, dan pembeli termasuk bagi para pelaku penunjang seperti tukang parkir. Bagi pemerintah sebagai pengelola juga mendapat manfaat dari pemasukan retribusi yang akan disalurkan kembali bagi kepentingan masyarakat luas.

Lebih dari itu, di pasar tradisional sudah terbiasa tercipta interaksi antara pedagang dan pembeli, yaitu terjalin komunikasi verbal lewat tatap muka langsung. Intensitas interaksi di dalam pasar tradisional tidak kita temukan di pasar modern. Pasar tradisional menciptakan proses tawar-menawar antara pedagang dengan pembeli dan hal ini sudah terjadi dari dulu kala, yang berbeda halnya dengan pasar modern.

Di balik peranan pasar tradisional tersebut tidak terlewat berbagai permasalahan yang membutuhkan perhatian Pemerintah. Keberadaan pasar tradisional kini semakin menurun seiring dengan pesatnya perkembangan pasar modern. Kehadiran pasar-pasar modern yang dikelola dengan baik dan profesional oleh para investor diklaim telah mendiskreditkan keberadaan pasar tradisional. Sebagian besar pasar tradisional masih terkesan becek, bau, sumpek, pengap, dan kotor. Hal tersebut dibuktikan dari berbagai hasil penelitian khususnya di kota-kota besar di Indonesia yang menunjukkan bahwa keberadaan pasar modern telah berdampak pada penurunan omset pedagang di Pasar Tradisional secara signifikan. (Fransisca Yaningwati, dkk, 2009).

Namun, kehadiran pasar modern tersebut bukan satu-satunya penyebab penurunan produktivitas pasar tradisional. Persoalan internal seperti buruknya manajemen pasar, minimnya sarana dan prasarana pasar hingga minimnya bantuan permodalan turut andil dalam penurunan omset penjualan di pasar tradisional. Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk bertransaksi di pasar modern. Kehadiran pasar modern juga sedikit demi sedikit mengubah gaya hidup sebagian masyarakat. Masyarakat saat ini tampaknya lebih

memilih berbelanja di pasar-pasar modern dengan berbagai pertimbangan, seperti kenyamanan, kebersihan, kualitas barang, sampai alasan demi gengsi. Masyarakat lebih merasa bangga ketika dapat membeli produk dari pasar modern karena alasan kualitas yang lebih bagus dengan harga yang mahal.

Tumbuhnya pasar modern juga dapat mengancam keberadaan produk lokal karena sebagian besar produk yang dijual di pasar modern adalah produk impor, mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan tersier. Akan tetapi, kehadiran pasar tradisional masih sangat dibutuhkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Para petani masih bergantung pada pasar tradisional untuk menjual hasil produksinya karena tidak semua hasil produksi mereka dapat menembus pasar modern. Di samping itu, segmen pasar keduanya juga berbeda namun dengan lokasi yang berdekatan dapat menjadi permasalahan tersendiri. Menghadapi kondisi permasalahan pasar tradisional tersebut, Pemerintah merubah penampilan pasar tradisional dengan merevitalisasi pasar. Upaya merevitalisasi berupaya untuk mengubah penampilan pasar tradisional yang di citra akan becek, kumuh, semrawut, dan tidak ada kepastian harga.

Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah dan menjadi salah satu kota terbesar yang memiliki potensi sangat tinggi dalam hal perdagangan. Letaknya yang strategis, yaitu berada di perlintasan Pantura, kondisi geografis Kota Semarang yang berada di pesisir Laut Jawa dan memiliki pelabuhan Tanjung Mas, yang relatif besar guna menunjang aktifitas perdagangan antar pulau di Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pasar Tradisional dan Pasar Modern**  
**di Kota Semarang Tahun 2013-2015**

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah					
		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
<b>1.</b>	<b>Pasar Tradisional</b>	<b>70</b>	<b>13 %</b>	<b>67</b>	<b>12 %</b>	<b>50</b>	<b>9 %</b>
	a. Pasar Kota	9	13 %	9	13 %	16	32 %
	b. Pasar wilayah	21	30 %	21	31 %	11	22 %
	c. Pasar Lingkungan	40	57 %	37	56 %	23	46 %
<b>2.</b>	<b>Pasar Modern</b>	<b>467</b>	<b>87 %</b>	<b>499</b>	<b>88 %</b>	<b>503</b>	<b>91 %</b>
	a. Mall/Plaza	5	11 %	5	1 %	5	1 %
	b. Swalayan/ Supermarket/ Toserba	35	75 %	38	8 %	42	8 %
	c. Mini market	427	14 %	456	91 %	456	91 %
<b>3.</b>	<b>Total Pasar</b>	<b>537</b>	<b>100%</b>	<b>566</b>	<b>100%</b>	<b>553</b>	<b>100%</b>

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2017

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah pasar modern dari tahun 2013 sampai tahun 2015 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 jumlah pasar modern sebanyak 467 atau 87% pasar, tahun 2014 sebanyak 499 atau 88% dan tahun 2015 sebanyak 503 atau 91% pasar. Namun, kondisi tersebut sangat berbanding terbalik dengan pasar tradisional yang mengalami penurunan yang sangat tajam. Tahun 2013 jumlah pasar tradisional sebanyak 70 atau 13% pasar, tahun 2014 sebanyak 67 atau 12% pasar, dan tahun 2015 sebanyak 50 atau pasar. Penurunan jumlah pasar ini diakibatkan karena pasar sepi pembeli, kerusakan infrastruktur dan pada akhirnya adanya penghapusan pasar.

Penurunan jumlah pasar tradisional dibandingkan pasar modern seperti yang dimuat dalam tabel diatas tidak boleh dibiarkan secara terus- menerus maka pasar tradisional akan menghilang denga sendirinya dan digantikan dengan pasar

modern. Hilangnya pasar-pasar tradisional akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah, seperti bertambahnya pengangguran, menurunnya daya beli akibat tingkat pendapatan per kapita yang semakin kecil, melemahnya sektor-sektor perdagangan informal, terhambatnya arus distribusi kebutuhan pokok, dan lain-lain yang pada akhirnya bermuara pada marginalisasi ekonomi pasar tradisional.

Mengingat pentingnya peran pasar tradisional dalam perekonomian masyarakat, permasalahan-permasalahan seputar pasar tradisional harus segera diatasi. Walaupun secara kuantitatif penurunan pasar tradisional lebih diakibatkan oleh faktor internal yang mengakibatkan kurangnya daya saing namun sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat pemerintah, pemerintah harus melindungi pasar Tradisional. Peran pemerintah pun turut diharapkan dalam mengatasi permasalahan pasar tradisional sehingga dapat mengejar ketertinggalan dan meningkatkan daya saing pasar tradisional dalam kancah perdagangan yang semakin bebas sehingga nasib pelaku ekonomi yang terlibat dapat di selamatkan.

Tidak seperti pasar modern yang dikelola secara profesional dengan kualitas manajemen dan SDM yang baik serta responsif dalam menghadapi perubahan jaman, pasar tradisional lebih banyak melibatkan masyarakat golongan menengah ke bawah dengan kemampuan yang terbatas. Oleh karena itu, sebagai suatu negara yang menganut prinsip kesejahteraan peran aktif pemerintah diperlukan.

Peran aktif pemerintah diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dan meningkatkan daya saing pasar tradisional dalam kancah perdagangan yang

semakin bebas sehingga nasib ribuan pelaku ekonomi yang terlibat di dalamnya dapat diselamatkan. Dalam rangka ini, Pasar tradisional menjadi salah satu target Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama periode 2014-2019. Dalam Visi Misi dan Program Aksi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terkait dengan upaya pencapaian prinsip “Berdikari dalam Bidang Ekonomi” disebutkan bahwa akan dijalankan program renovasi dan revitalisasi terhadap 5000 pasar tradisional yang berumur lebih dari 25 tahun.

Ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/ M-Dag/ Per/ 8/ 2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Di dalam Permendag No. 61/M-Dag/Per/8/2015 Pasal 13 disebutkan bahwa revitalisasi pasar tradisional dilakukan melalui revitalisasi: yaitu revitalisasi fisik, revitalisasi manajemen, revitalisasi sosial budaya, dan revitalisasi ekonomi.

Visi Kota Semarang, yaitu “ terwujudnya Kota perdagangan dan Jasa, yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera” mewajibkan Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk mempertahankan eksistensi pasar tradisional yang menjadi salah satu basis budaya yang perlu dilestarikan, karena secara tidak langsung pasar tradisional menjadi pusat ekonomi terbuka untuk rakyat dan pusat budaya yang melibatkan aspek komunikasi literal, visual, verbal, dan non-verbal antarsesama.

Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional sebagai wujud untuk

mempertahankan eksistensi pasar tradisional di Kota Semarang. Dalam Pasal 34 Ayat 3 disebutkan bahwa revitalisasi pasar ditujukan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali kegiatan perdagangan yang terdapat di pasar. Pemerintah Kota Semarang telah melakukan program revitalisasi di beberapa pasar tradisional.

Upaya pengaturan pasar tradisional berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional bertujuan untuk :

1. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah;
4. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi;
6. Mewujudkan keterpaduan pengelolaan pasar secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang kota secara keseluruhan;
7. Mewujudkan keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan perdagangan; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar.

Adanya PERDA Nomor 9 Tahun 2013 menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengelola dan memberdayakan pasar tradisional mampu berkembang dan mampu menjadi pusat ekonomi rakyat. Kota Semarang sendiri memiliki pasar tradisional yang banyak dan perlunya perhatian dari Pemerintah Kota. Adapun nama- nama pasar tradisional se - kota Semarang adalah:

**Tabel 1.2**  
**Nama Pasar Se-Kota Semarang**  
**Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2017**

UPTD Pasar Wilayah Johar	UPTD Pasar Wilayah Bulu	UPTD Pasar Wilayah Karimata
Yaik Baru Yaik Permai Johar Selatan Johar Tengah Johar Utara	Bulu Randusari Sampangan Surtikanti Purwogondo Boom Lama Tanah Mas	Rejomulyo Karimata Dargo Bubakan Waru Indah Langgar
UPTD Pasar Wilayah Karangayu	UPTD Pasar Wilayah Jatingaleh	UPTD Pasar Wilayah Pedurungan
Gunung Pati Mangkang Manyaran dan Purwoyoso Ngaliyan Karangayu Simongan Mijen Jerakah	Jatingaleh Wonodri Peterongan Sisingamaraja Kagok Janggal Damar Rasamala Banyumanik Sron dol Penggaron	Tlogosari Satriowibowo Udan Riris Mrican Suryokusumo Genuk Kedungmundu Pedurungan Bangetayu Gayamsari

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2017

Salah satu pasar tradisional yang direvitalisasi yaitu Pasar Bulu Kota Semarang di Jalan Soegiyopranoto yang tergolong sebagai pasar kota, yaitu pasar yang ruang lingkup pelayannya meliputi wilayah kota. Pembangunan dan Penataan Pasar Bulu sendiri mengalami 4 tahap, dikarenakan dana yang dikucurkan juga dilakukan 4 kali sebab APBD Kota Semarang tidak mampu memberikan dana sekaligus untuk pembangunan. Rincian dana tersebut per taun antara lain sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Rincian Dana Revitalisasi Pasar Bulu**

<b>Sumber Dana</b>	<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Jumlah</b>
APBN	2012	Rp. 10.000.000.000
APBD Provinsi Jawa Tengah	2013	Rp. 9.500.000.000
	2015	Rp. 22.000.000.000
APBD kota Semarang	2013	Rp. 12.500.000.000
	2014	Rp. 5.000.000.000
	2015	Rp. 5.500.000.000
<b>Jumlah Dana</b>		<b>Rp. 64.500.000.000</b>

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2017

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa dana revitalisasi pasar Bulu yang mencapai 64,5 milyar. Dana tersebut digunakan untuk membangun bangunan fisik pasar dan mewujudkan pasar Bulu sebagai pasar semi modern dan pasar percontohan.

Revitalisasi pasar Bulu dilakukan untuk memperbaiki kondisi bangunan pasar sehingga pasar Bulu yang nantinya mampu menampung para pedagang kaki lima atau (PKL) yang ada di sekitar pasar, termasuk juga PKL yang berada di Jl. Pandaran. Diharapkan dengan revitalisasi Pasar Bulu ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Semarang dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Pasar Bulu di revitalisasi guna menjadi pasar percontohan di Kota Semarang dengan menjadikan Pasar Bulu sebagai Pasar Semi Modern, hal ini dilakukan bertujuan guna meningkatkan daya saing Pasar Bulu sendiri terhadap pasar modern yang ada di kota Semarang.

Alasan lain dari program revitalisasi terhadap Pasar Bulu ini adalah rencana Pemerintah Kota Semarang yang hendak menjadikan kawasan Tugu Muda dan sekitarnya sebagai pusat tujuan wisata dan kawasan sentral di Kota Semarang. Letaknya yang berada di jantung Kota, dimana terdapat Tugu Muda,

Lawang Sewu, kawasan pusat oleh-oleh Pandanaran, Wisma Perdamaian, Gedung Pandanaran, menjadikan Pasar Bulu harus dibenahi agar selaras dengan situs-situs yang ada di sekitarnya.

Meskipun revitalisasi Pasar Bulu telah dilaksanakan namun terdapat beberapa permasalahan yang muncul. Permasalahan yang dihadapi pasar Bulu ini yang paling dirasakan adalah sepi pengunjung pada pasar Bulu, padahal seperti yang kita ketahui bahwa pasar Bulu adalah pasar yang masih baru direvitalisasi yang di sahkan pada akhir tahun 2014. Bangunan baru dan megah seakan tidak menjamin akan bertambahnya pengunjung pada pasar Bulu. Dana yang gelontorkan dengan nilai 64,5 Milyar pun seakan tidak dirasakan. Permasalahan pasar Bulu ini seperti yang dilontarkan oleh Kepala Pasar Bulu Pak Suwarni ( wawancara Hari Jumat, 16/03/2017) yaitu :

*“kios yang tidak mau diisi oleh para pedagang dikarenakan penataan kios yang tidak sesuai dengan harapan mereka, dimana kios relatif kecil, sehingga penataan dagangan yang menjadi jelek, los-los berdagang yang dibuat tinggi menjadi sulit bagi pedagang, selain itu tidak adanya lahan parkir setiap lantai di Pasar Bulu yang berjumlah 3 lantai membuat pedagang merasa kesulitan untuk membongkar barang dagangannya serta harga sewa pengangkut barang yang bertambah mahal karena harus mengangkut 2 kali, selain itu pengunjung yang sepi membuat banyak pedagang bangkrut dan menutup kios-kiosnya ditambah basement tempat parkir yang selalu tergenang banjir”.* (Wawancara Tanggal 16 Maret 2017)

Pernyataan wawancara di atas ditemukan beberapa permasalahan dalam pengembangan pasar Bulu Kota ini, dan jika dilihat dari beberapa aspek masalahnya diantaranya : *Pertama*, dilihat dari aspek fisik yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional khususnya dalam Bab IV yaitu pengelolaan pasar belum terselenggara dengan baik seperti kondisi pasar yang berbau tidak sedap, kotor, kumuh, area bongkar muat

yang belum tersedia, pompa air di basement (tempat parkir) Pasar Bulu yang tidak berfungsi yang jika saat hujan deras mengakibatkan area parkir banjir, dan atap lantai tiga yang bocor, kamar mandi umum yang terlihat kotor, serta beberapa fasilitas yang belum berfungsi dengan baik. *Kedua*, dari aspek ekonomi, penerimaan retribusi pasar mengalami penurunan, pedagang belum merasakan keramaian pembeli, terlebih-lebih pembeli yang berada pada ujung jalan pintu utama yang berdampak pada penurunan omset penjualan, berkurangnya jumlah pedagang pasar, serta kurangnya produk yang diperdagangkan di pasar. Dalam aspek ekonomi sangatlah terlihat kekurangannya apalagi setelah dilakukan revitalisasi, setelah revitalisasi dilakukan pasar Bulu nyatanya lebih sepi pengunjung dan banyak pedagang yang mulai berkurang berjualan dibandingkan sebelum dilakukannya revitalisasi. *Ketiga*, aspek manajemen yaitu masih banyak pedagang yang berjualan di area parkir, zonasi pedagang yang kurang tepat, kepatuhan pedagang yang kurang, serta pelayanan pasar yang kurang optimal. *Keempat*, aspek sosial budaya yaitu belum terwujudnya kondisi pasar yang nyaman, serta masih rendahnya keikutsertaan pedagang dalam paguyuban pedagang pasar Bulu sebagai wadah kegiatan sosial dan inspirasi para pedagang.

Melihat uraian diatas, program revitalisasi Pasar bulu belumlah berjalan dengan baik serta penyelenggaraan kebijakan pemerintah belum terlaksana dengan baik. Apabila permasalahan di pasar Bulu tidak diatasi dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan bahwa upaya revitalisasi yang diharapkan pemerintah kota Semarang menjadi sia-sia dan tujuan dari revitalisasi tidak tercapai.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, maka penulis merasa tertarik meneliti berbagai permasalahan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang terkait dalam pengembangan Pasar Bulu. Penelitian ini menggunakan analisis kebijakan dengan teori paper kebijakan, untuk mendapatkan alternatif-alternatif kebijakan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi keseluruhan proses kebijakan, untuk itu penulis memilih judul “**Analisis Kebijakan Pengembangan Pasar Bulu Kota Semarang Berdasarkan Pada PERDA Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisonal**”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana rumusan masalah pada kebijakan pengembangan Pasar Bulu Kota Semarang berdasarkan pada Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisonal ?
2. Bagaimana rumusan alternatif kebijakan pengembangan Pasar Bulu Kota Semarang berdasarkan pada Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisonal ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan telah ditetapkan tujuan-tujuan penelitian yang relevan dengan data-data yang diperoleh. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi masalah kebijakan pengembangan Pasar Bulu Berdasarkan Pada Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisonal.

2. Merumuskan alternatif kebijakan pengembangan Pasar Bulu Berdasarkan Pada Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dimanfaatkan oleh peneliti sebagai sarana relevansi ilmu yang diperoleh dalam studi di perguruan tinggi, khususnya disiplin ilmu administrasi publik. Dalam penelitian ini dikhususkan pada teori Analisis Kebijakan.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Kegunaan praktis dalam penelitian tentang Analisis Kebijakan Pengembangan Pasar Bulu Kota Semarang Berdasarkan Pada PERDA Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional ini, yaitu :

1. Bagi Praktisi

Instansi-instansi yang terkait, seperti Dinas Perdagangan, UPTD Pasar Bulu, dan Kepala Pasar Bulu Kota Semarang yang bekerjasama dengan pemerintah Kota Semarang. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi instansi yang terkait tentang sejauh mana pengembangan Pasar Bulu di Kota Semarang. Selain itu, dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi pemerintahan Kota Semarang dalam upaya menangani permasalahan yang sehubungan dengan pelaksanaan pengembangan Pasar Bulu tersebut agar mencapai tujuan yang ditetapkan.

## 2. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penelitian mengenai pengembangan Pasar Bulu di Kota Semarang.

### 1.5 KERANGKA TEORI

#### 1.5.1 Administrasi Publik

Administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Banyak para ahli memberikan defenisi terhadap administrasi publik diantaranya sebagai berikut:

Menurut **Jhon M. Pfifner dan Robert V.Presthus** dalam Inu Kencana Syafiie (2006:23-24):

*“Public administration involves the implementation of public policy which has been determine by representative political bodies. public administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy. It is mainly accupied with the daily work of goverments. in sum, public administration is a process concerned with carrying out public policies, encompassing innumerable skills and techniques larga numbers of people”.*

Jadi menurut Pfifner dan Presthus administrasi meliputi: Implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan perwakilan politik. Administrasi publik dapat di defenisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama pada pekerjaan sehari-hari pemerintah. Secara global administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Berdasarkan teori administrasi publik yang dikemukakan oleh Pfifner dan Presthus dapat disimpulkan bahwa suatu pelaksanaan implementasi pemerintah itu merupakan sekumpulan dari koordinasi dari setiap unit, baik dari unit pemerintah, swasta, dan masyarakat yang sebelumnya telah disepakati bersama dalam rangka menciptakan suatu tatanan pemerintahan yang baik. Dimana hal ini berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh unit-unit lainnya. Didalam administrasi publik terdapat kebijakan publik dan manajemen publik yang menjadi pokok pembahasannya .

### **1.5.2 Paradigma Administrasi Publik**

Nicholas Henry dalam Keban (2008:31-33) menggunakan bahwa telah terjadi lima paradigma dalam administrasi publik, seperti diuraikan sebagai berikut:

1. Paradigma 1 (1900-1926) Dikenal Sebagai Paradigma Dikotomi Politik Dan Administrasi.

Tokoh dari paradigma ini adalah **Frank J. Goodnow** dan **Leonardo D. White** dalam tulisannya yang berjudul "*Politics And Administration*" pada tahun 1900 mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedangkan administrasi memberikan perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi atau kehendak tersebut.

Pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresi kehendak rakyat, dengan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak rakyat tersebut. Badan yudikatif dalam hal ini berfungsi membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Implikasi dari paradigma tersebut

adalah bahwa administrasi harus dilihat sebagai suatu yang bebas nilai, dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari *Government Bureaucracy*. Namun dalam paradigma ini hanya ditekankan aspek locus saja yaitu *government bureaucracy*, tetapi fokus atau metode apa yang harus dikembangkan dalam administrasi kurang jelas dibahas secara jelas dan terperinci.

## 2. Paradigma 2 (1927-1937) Disebut Sebagai Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi

Tokoh-tokoh yang terkenal dari paradigma ini **willoughby, gullick and urwick**, yang sangat dipengaruhi oleh tokoh manajemen klasik seperti fayol dan taylor. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik. Prinsip tersebut dituangkan dalam apa yang disebut sebagai POSDCORB (*Planning, Organizaing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting Dan Budgeting*) yang menurut mereka dapat diterapkan dimana saja, atau bersifat universal. Sedangkan locus dari administrasi publik tidak pernah diungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja termasuk diorganisasi pemerintah. Dalam paradigma ini fokusnya lebih ditekankan daripada lokusnya.

## 3. Paradigma 3 (1950-1970) Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik

Dalam konteks ini, administrasi negara bukan *value free* atau dapat berlaku dimana saja, tetapi justru dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu. Disini terjadi pertentangan antara anggapan mengenai *value-free administration* disuatu pihak dengan anggapan bahwa *value-faden politics* dilain pihak. Akibatnya muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik

dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi mengandung banyak kelemahan. Perlu diketahui bahwa pada masa tersebut administrasi mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap disiplin yang sangat dominan didalam dunia administrasi publik.

4. Paradigma 4 (1956-1970) Administrasi Negara Sebagai Ilmu Administrasi. Dalam paradigma ini prinsip manajemen yang telah populer sebelumnya, dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Fokus dari paradigma ini adalah perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi dan sebagainya. Dua arah terjadi dalam paradigma ini, yaitu yang berorientasi pada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial, dan yang berorientasi pada kebijakan publik. Sedangkan lokusnya menjadi tidak jelas karena dapat diterapkan dimana saja.

5. Paradigma 5 (1970-sekarang) Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik.

Pada paradigma ini terdapat fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik dalam teori ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik; sedangkan lokusnya adalah masalah dan kepentingan publik. Salah satu fokus administrasi publik pada paradigma yang kelima yaitu kebijakan publik sesuai dengan penelitian yaitu Analisis Kebijakan Pasar Bulu Kota Semarang.

Dari penjelasan berbagai konsep mengenai administrasi publik dapat kita simpulkan berbagai konsep mengenai administrasi publik dapat kita simpulkan

bahwa suatu administrasi publik ini merupakan organisasi publik yang melakukan perumusan kebijakan publik, kemudian kebijakan ini diimplementasi dengan menggunakan prinsip manajemen publik guna memberikan pelayanan publik yang maksimal. Penjelasan ini menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu instrumen dalam administrasi publik yang tidak dapat dipisahkan, maka pada bagian selanjutnya akan dijelaskan secara mendalam mengenai kebijakan publik.

### **1.6 Kebijakan Publik**

Menurut Carl J. Frederick dalam Irfan Islamy, (2007 : 17) kebijakan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan dalam Irfan Islamy, (2007 :17) mengartikan sebagai kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek yang terarah.

James E. Anderson dalam Irfan Islamy, (2007 :17) mengartikan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan menurut Amara Raksataya dalam Irfan Islamy, (2007 :17) mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat 3(tiga) elemen yaitu sebagai berikut :

- 1) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai

- 2) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
- 3) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Dari keempat pengetahuan kebijakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan dan strategi yang memiliki tujuan tertentu untuk memecahkan suatu permasalahan yang dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku. Dengan demikian terdapat beberapa hal yang terkandung beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan yaitu :

- a. Tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah suatu kepentingan yang berpihak pada kepentingan publik.
- b. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan, artinya bahwa strategi yang disusun untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan adalah strategi yang disusun yang biasanya dijabarkan dalam bentuk program dan proyek-proyek.
- c. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorang atau sekelompok dari dalam pemerintahan atau dari luar (swasta).
- d. Penyediaan input untuk melaksanakan strategi. Input merupakan sumber daya manusia maupun bukan manusia.

Menurut Irfan Islamy kata publik diartikan beranekaragam dalam bahasa Indonesia, tergantung pada kata yang menyertainya. Publik diartikan sebagai umum, rakyat, masyarakat, publik, dan negara atau pemerintah.

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye dalam Irfan Islamy, (2007 : 18) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan

*(public policy is whatever governments choose to do or not to do)*. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik dari Thomas R.Dye tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

James E. Anderson dalam Islamy, (2007 : 19) mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Menurut Anderson, implikasi dari pengertian kebijakan publik tersebut adalah : (1) bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, (3) bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, (4) bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, dan (5) bahwa kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.

David Easton dalam Irfan Islamy, (2007 : 19) memberikan arti kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. Berdasarkan definisi ini, Easton menegaskan bahwa hanya

pemerintah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakat dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan (Nugroho, 2003: 50). Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Al ini berarti sluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi untuk semesntara dapat disimpulkan bahwa :

- a. Kebijakan publik mudah dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
- b. Kebijakan publik mudah diukur karena ukurannya jelas, yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Selanjutnya dapat ditarik intisarinnya bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau *action* dari pemerintah mengenai pencarian jalan keluar dari permasalahan yang tidak dapat lagi diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri dan terdapat paksaan kepada masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakannya.

Secara analisis terdapat dua unsur yang terdapat dalam kebijakan yaitu tujuan kebijakan (*policy objective*) dan cara atau peralatan untuk mencapai tujuan (*policy instrument*). Tujuan tertentu yang ingin dicapai merefleksikan nilai yang mendasari dan ingin diwujudkan. Hal ini mempengaruhi cara atau langkah-

langkah yang dipilih atau instrumen untuk mencapainya. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan secara keseluruhan merupakan “sistem kebijakan”.

Mustopa Didjada (1992 : 12) mengemukakan sistem kebijakan terdiri dari unsur-unsur berikut ini :

1. Lingkungan Kebijakan

Yaitu keadaan yang melatarbelakangi timbulnya masalah kebijakan yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan itu sendiri.

2. Pembuat dan Pelaksana Kebijakan

Yaitu orang, sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan tertentu dalam kebijakan, sebab mereka berada dalam dalam posisi yang menentukan atau mempengaruhi baik pembuat kebijakan atau pelaksana.

3. Kebijakan itu Sendiri

Yaitu serangkaian pilihan yang lebih berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu.

4. Kelompok Sasaran Kebijakan

Yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh bersangkutan.

Secara umum sesungguhnya aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan publik dapat dikategorikan dalam tiga domain utama yaitu : (1) aktor publik meliputi aktor senior dalam Kementerian, Kabinet, atau departemen-departemen tertentu di bawah kendali Presiden, (2) aktor privat, beberapa kelompok seperti *pressure and interest groups* terlibat secara signifikan dalam agenda kebijakan publik, konsultasi publik, evaluasi, dan juga umpan baik kebijakan publik,

kelompok ini tergantung pada substansi masalah pada kebijakan yang dibuat, dan (3) aktor masyarakat (*civil society*) meliputi banyak pihak baik yang bersifat assosiasional maupun tidak, di mana banyak berkembang di kalangan masyarakat umum. Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), kerukunan antar rumah tangga dalam sebuah kelompok masyarakat (ke-RT-an dan ke-RW-an) juga merupakan suatu struktur sosial yang berada pada level *civil society*.

Secara sederhana siklus kebijakan terbagi dalam tiga kelompok kegiatan pokok, yaitu :

a. Perumusan kebijakan (Formulasi Kebijakan)

Dalam kelompok ini terdapat kegiatan pengambilan keputusan dan pengesahan kebijakan sehingga merupakan keputusan formal organisasional yang memiliki kekuatan hukum atau bersifat mengikat baik obyek maupun subyek dari kebijakan tersebut.

b. Implementasi Kebijakan

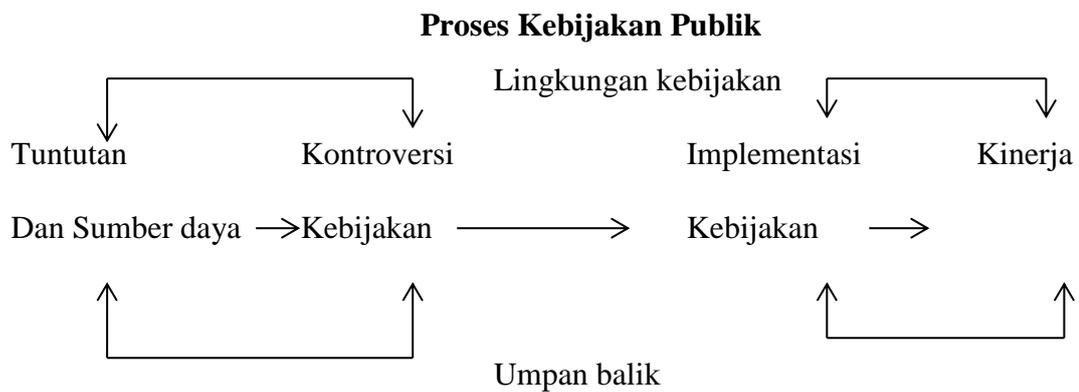
Yaitu kegiatan yang tertuju pada bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut.

c. Evaluasi Kebijakan

Yaitu kegiatan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut telah dicapai. Selaku pengamat kebijakan, bagaimanapun juga pemerintah ingin agar tujuan kebijakannya tercapai maka ia berekepentingan untuk menjaga proses implementasi sebaik mungkin, dan seandainya kebijakan tetap gagal mencapai tujuan, pemerintah pasti ingin mengetahui penyebab kegagalan tersebut, agar hal yang sama tidak terulang di

masa depan. Untuk inilah evaluasi kebijakan perlu dilakukan oleh pemerintah (Wibawa, 1994 : 8).

**Gambar 1.1**



Sumber : Samodra Wibawa, 1994: 2

Kebijakan publik adalah (Islamy, 2007:20) :

- (1) Susunan rancangan tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapi oleh masyarakat.
- (2) Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
- (3) Masalah-masalah yang kompleks yang dinyatakan dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Di dalam studi kebijakan publik terdapat dua pendekatan (Subarsono, 2005 :5) yakni :

#### 1. Analisis Kebijakan (Policy Analisis)

Studi analisis lebih terfokus pada studi pembuatan keputusan (*decision making*) dan penetapan kebijakan (*policy formation*) dengan menggunakan model-model statistik dan matematika yang canggih.

## 2. Kebijakan Publik Politik (*Political Public Policy*)

Studi kebijakan publik politik lebih menekankan pada hasil dan outcome dari kebijakan publik daripada penggunaan metode statistik, dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu, dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan lingkungan.

Dari skema diatas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Setiap proses dalam kebijakan publik memiliki peran masing-masing dalam menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Formulasi sebagai tahap awal dari proses kebijakan memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan sebuah kebijakan publik. Ketika formulasi kebijakan tidak berjalan baik, maka kebijakan yang dihasilkan pun tidak akan baik. Jika kebijakan yang dihasilkan tidak baik, maka akan sulit mendapat legitimasi dari masyarakat, sehingga kebijakan mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Di sinilah peran dari analisis kebijakan diperlukan. Analisis kebijakan akan berperan sebagai perumus masalah, pelaku forecasting, menemukan alternatif-alternatif, dan memberikan rekomendasi kebijakan terbaik untuk menjawab masalah yang ada di masyarakat terkait kebijakan yang akan dihasilkan.

Mengingat peran analisis kebijakan yang relatif besar dalam menghasilkan sebuah kebijakan, maka penulis akan membahas lebih lanjut mengenai analisis kebijakan publik ini dalam sub-sub selanjutnya.

### **1.6.1 Analisis Kebijakan Publik**

Analisis kebijakan publik adalah sebuah seni di dalam memahami sebuah rencana kebijakan publik yang akan diterapkan oleh sebuah otoritas publik. Analisis kebijakan publik memerlukan sebuah uraian tentang data, informasi dan berbagai alternatif yang mungkin ditempuh untuk menentukan sebuah kebijakan publik.

Analisis kebijakan bukanlah sebuah keputusan, tetapi lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuatan kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang harus dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, berbagai alternatif serta kemungkinan rencana kebijakan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masalah kepada pihak pembuatan kebijakan yang memiliki legitimasi atau kewenangan (Badjuri dan Yuwono, 2002 : 65).

Sedangkan menurut William Dunn (2003:97), analisis kebijakan publik adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan. Analisis kebijakan publik dapat dilakukan pada permasalahan publik yang telah ada kebijakannya ataupun permasalahan publik yang belum ada kebijakannya.

Analisis kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup lima komponen, dan setiap komponen dapat berubah menjadi komponen yang lain melalui prosedur metodologi tertentu, seperti perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi. Melakukan analisis kebijakan berarti

menggunakan kelima prosedur metodologi tersebut, yakni merumuskan masalah kebijakan, melakukan peramalan, membuat rekomendasi, melakukan pemantauan, dan melakukan evaluasi kebijakan.

Sedangkan menurut Bridgman dan Davis dalam Badjuri dan Yuwono, (2002 :65) dalam analisis kebijakan setidaknya-tidaknya meliputi lima langkah dasar yaitu sebagai berikut :

a. Memformulasikan Masalah Kebijakan

Hal ini merupakan langkah pertama dalam sebuah analisis kebijakan, memformulasikan masalah merupakan pekerjaan yang sangat prinsipil dan krusial. Hal ini dikarenakan apabila dalam memformulasikan masalahnya salah maka akan dengan sendirinya kebijakan publik yang diterapkannya salah pula.

b. Menentukan Tujuan dan Sasaran

Tahapan ini akan sangat penting karena akan menentukan prioritas kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Merumuskan tujuan dan sasaran bukanlah hal yang mudah oleh karena berbagai kompleksitas masalah dan kepentingan. Namun, karena semua kebijakan publik ditujukan kepada peningkatan kualitas dan kesejahteraan umum maka dalam tataran umum semua tujuan dan sasaran harus diarahkan kepada terciptanya kesejahteraan sesuai dengan bidang-bidang kebijakannya.

c. Mengidentifikasi parameter Kebijakan

Identifikasi parameter kebijakan penting dalam rangka melakukan tes atau pengujian terhadap hal-hal yang mungkin dilakukan berkaitan dengan sebuah

proposal kebijakan. Parameter-parameter kebijakan ini perlu didalami lebih lanjut khususnya berkaitan dengan indikator-indikator pertanyaan seperti :

1. Apakah nasehat kebijakan yang disampaikan sesuai dan relevan dengan kondisi saat ini ?
2. Apakah nasehat kebijakan kebijakan yang disampaikan menyediakan pandangan ke depan (*forward looking*) yang lengkap dan memungkinkan ?
3. Apakah nasehat kebijakan yang ditawarkan bisa mengantisipasi berbagai hal yang mungkin timbul dikemudian hari ?
4. Apakah nasehat kebijakan yang disediakan menyediakan implikasi-implikasi (politis, ekonomis, lingkungan, dan sebagainya) dari setiap pilihan alternatif ?
5. Apakah nasehat kebijakan menyediakan strategi yang jelas dan realistis terhadap sebuah proposal kebijakan ?
6. Apakah nasehat kebijakan tersebut mudah dilaksanakan ?

d. Mencari alternatif-alternatif

Tahapan selanjutnya dalam analisis kebijakan adalah pencarian alternatif-alternatif kebijakan. Tahapan ini membutuhkan penelitian yang serius dan mendalam. Tujuan penelitian ini pada pokoknya adalah untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi atau masalah yang relevan serta mengidentifikasi berbagai respon (tanggapan) yang mungkin dilakukan. Beberapa masukan yang bisa dijadikan dasar atau metode mencari alternatif adalah (1)mempelajari kebijakan yang sedang berlangsung saat ini baik yang terjadi di daerah lain, Indonesia atau mungkin negara lain; (2) mempelajari penemuan

internasional mengenai permasalahan yang relevan dengan sebuah proposal kebijakan; (3) mempelajari berbagai informasi, *review*, laporan atau seminar yang berkaitan dengan isu kebijakan tersebut; (4) mempelajari jurnal-jurnal akademik terbaru yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kebijakan tersebut; (5) melakukan curah fikir, diskusi dengan para ahli baik yang berada dalam struktur pemerintahan maupun non pemerintahan seperti perguruan tinggi ataupun pusat studi dan pusat kajian lainnya yang berkompeten; (6) melakukan konsultasi publik dengan masyarakat yang akan terkena publik dengan masyarakat yang akan terkena kebijakan dalam rangka mendalami masalah dan mengidentifikasi respon atau alternatif yang mungkin dilakukan.

e. Memutuskan alternatif-alternatif pilihan

Hal ini merupakan tahapan akhir dalam analisis kebijakan. Memutuskan alternatif-alternatif pilihan merupakan proses akhir yang harus dilakukan setelah tahapan mencari alternatif dilakukan. Ini artinya bahwa produk dari analisis kebijakan adalah rekomendasi kebijakan ini tentunya akan lebih baik jika lebih dari satu, agar pihak pengambilan keputusan bisa menimbang hal mana yang akan diputuskan. Analisis secara lengkap dari masing-masing alternatif-alternatif tertentu sangat diharapkan.

Setidaknya ada lima argumen tentang arti penting analisis kebijakan publik (Badjuri dan Yuwono, 2002 : 66), yaitu :

1. Dengan analisis kebijakan maka pertimbangan yang *scientific* rasional dan obyektif diharapkan dijadikan dasar bagi semua pembuatan kebijakan publik.

2. Analisis kebijakan yang baik dan komprehensif memungkinkan sebuah kebijakan didesain secara sempurna dalam rangka merealisasikan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan umum (*public welfare*).
3. Analisis kebijakan menjadi sangat penting oleh karena persoalan bersifat multidimensional, saling terkait terkait (*interdependent*) dan berkolerasi satu dengan lainnya.
4. Analisis kebijakan memungkinkan tersedianya panduan yang komprehensif bagi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.
5. Analisis kebijakan memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi publik. Hal ini dikarenakan dalam metode analisis kebijakan harus melibatkan aspirasi masyarakat.

Ada beberapa model analisis kebijakan yang dikemukakan oleh Wiliam Dunn (2003 : 117-124) yaitu sebagai berikut :

1. Model Prosefektif yaitu bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan 'sebelum' suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model prediktif, karena seringkali melibatkan teknik-teknik peramalan (*forecasting*) untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dari suatu kebijakan-kebijakan yang akan diusulkan.
2. Model Retropektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan 'setelah' suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan

evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.

3. Model Integratif adalah model perpaduan antara kedua model di atas. Model ini sering disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik 'sebelum' maupun 'sesudah' suatu kebijakan ini biasanya melibatkan teknik-teknik peramalan dan evaluasi secara terintegrasi.

Analisis kebijakan memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi publik. Hal ini dikarenakan dalam metode analisis kebijakan mesti melibatkan aspirasi masyarakat.

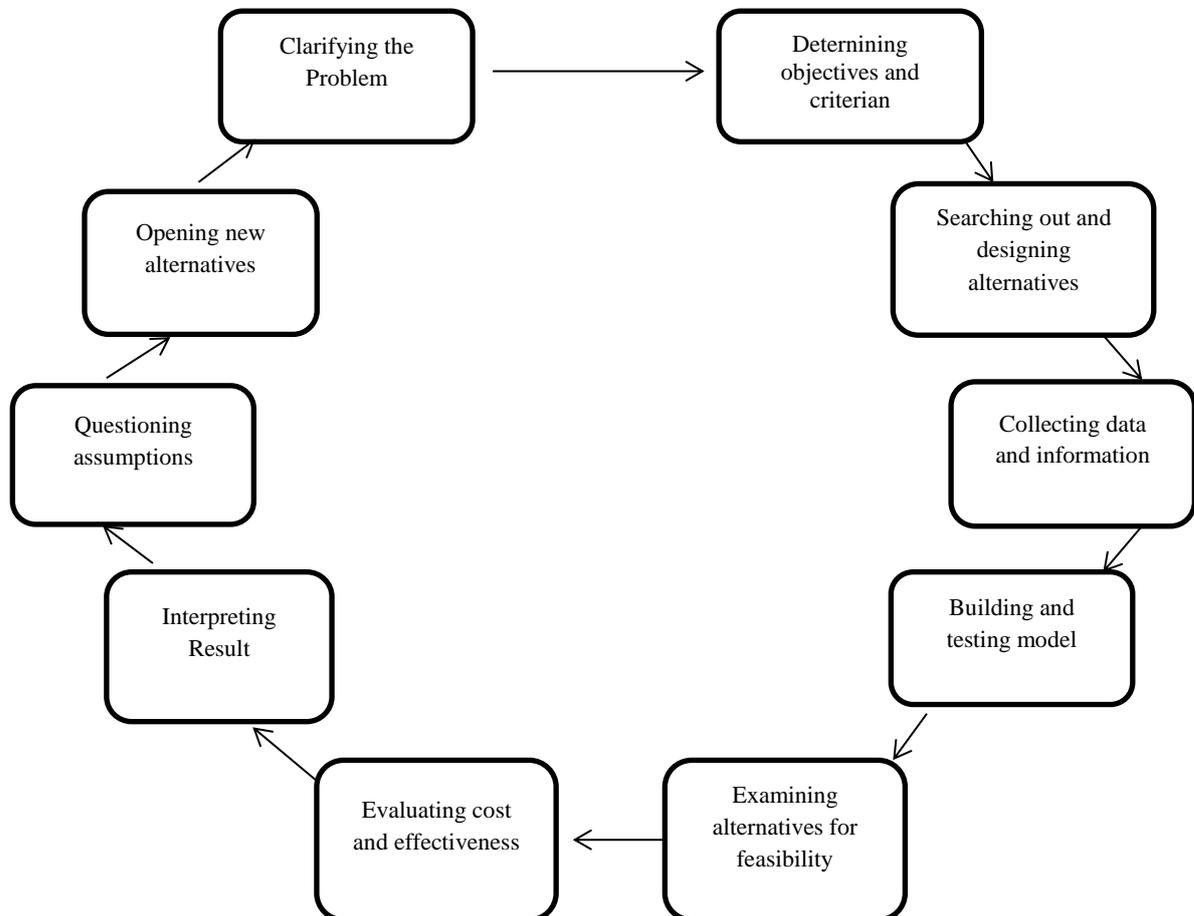
**Tabel 1.4**  
**Tahap Analisis Kebijakan**

Tahap	Karakteristik
Perumusan Masalah	Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
<i>Forecasting</i> (Peramalan)	Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dan ditetapkan alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
Rekomendasi kebijakan	Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.
Monitoring kebijakan	Memberikan rekomendasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
Evaluasi kebijakan	Memberikan informasi mengenai kinerja atau asil dari suatu kebijakan.

Sumber : A.G Subarsono, (2005 : 10)

Gambar 1.2

## Daur Analisis Kebijakan



Sumber : Quade dalam Riant Nugroho, (2011 : 369)

Akan tetapi, menurut Quade dalam Riant Nugroho, (2011 : 369) dalam pelaksanaan analisis kebijakan, tahapan yang perlu diperhatikan ternyata tidak sebanyak itu. Pertama, formulasi yaitu usaha untuk membatasi permasalahan. Kedua, pencarian atau *search* atau upaya untuk menemukan alternatif kebijakan. Ketiga, peramalan atau *forecasting* yaitu melakukan pemetaan masa depan. Keempat pembuatan model atau *modeling*, model digunakan untuk memprediksi kinerja kebijakan dan variabel-variabel lain dalam kondisi pelaksanaan kebijakan

dan lingkungan yang nyata. Kelima, evaluasi yaitu melakukan perbandingan alternatif untuk memudahkan pengambilan keputusan memilih alternatif kebijakan; keenam, konklusi dan rekomendasi alternatif kebijakan.

Dalam analisis kebijakan terdapat kriteria atau parameter kebijakan. Menurut Bardach yang dikutip Patton dan Sawicky dalam Keban, (1995 :55) ada empat kategori yang dapat dijadikan parameter atau kriteria dalam menilai alternatif kebijakan, yaitu:

1. *Technical Fasibility* (kelayakan teknis) yaitu kriteria yang digunakan untuk mengukur apakah keluaran (*outcome*) dari kebijakan atau program akan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain, apakah alternatif yang dipilih akan berjalan dengan konteks teknis.
2. *Economic and Financial Possibility* (kemungkinan ekonomi dan finansial) yaitu kriteria yang digunakan mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kebijakan dan beberapa kemungkinan yang dihasilkan. Kriteria ini menyangkut evaluasi ekonomis dari kebijakan atau program yang ada.
3. *Political Viability* (kehidupan politik) yaitu kriteria yang digunakan untuk mengukur apakah kebijakan akan berhasil dimana terdapat pengaruh dari berbagai kelompok kekuasaan, seperti pembuat keputusan, legislatif, administrator, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatanm perkumpulan dan aliansi politik lainnya.

4. Administrative Operability (administrasi). Kriteria spesifik dalam *administrative operability* adalah *authority, institutional commitment, capability dan organizational support*.

### **1.6.2 Tahapan Analisis Kebijakan**

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, hal ini dilakukan juga guna adanya kesinambungan dengan hasil penelitian bab 3 dan pembahasan bab 4 nantinya. Tahapan analisis kebijakan yang digunakan penelitian ini adalah dari teori Brigman dan Davis yang menyebutkan lima tahapan yaitu (1) memformulasikan masalah kebijakan; (2) Menentukan Tujuan; (3) mengidentifikasi parameter kebijakan; (4) mencari alternative-alternatif; dan (5) memutuskan alternative. Adapun analisis yang digunakan dikelompokkan menjadi dua yaitu :

#### 1. Masalah kebijakan

Mengidentifikasi tahapan masalah kebijakan terdiri dari :

##### a. Formulasi masalah kebijakan

Formulasi masalah kebijakan merupakan tahap awal untuk menginformasikan mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.

##### b. Menentukan tujuan kebijakan

Tahapan ini merupakan tahapan setelah formulasi masalah ditentukan, tahapan ini akan menentukan prioritas kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan.

c. Mengidentifikasi parameter kebijakan

Identifikasi parameter kebijakan melakukan tes atau pengujian terhadap hal-hal yang mungkin dilakukan berkaitan dengan proposal kebijakan.

2. Perumusan Alternatif

Merumuskan alternative kebijakan terdiri dari :

a. Mencari alternative-alternatif

Merupakan tahapan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi atau masalah yang relevan serta mengidentifikasi berbagai respon yang mungkin dilakukan.

b. Memutuskan alternatif pilihan

Memutuskan alternatif pilihan merupakan proses akhir yang harus dilakukan. Ini artinya bahwa produk dari analisis kebijakan adalah rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada pengambil keputusan.

### 1.6.3 Model Kebijakan Publik

#### 1.6.3.1 Model Elit

Model ini menggambarkan pembuatan kebijakan publik dalam bentuk piramida dimana masyarakat berada pada tingkat paling bawah, elit pada ujung piramida dan aktor internal birokrasi pembuat kebijakan publik berada di tengah-tengah antara masyarakat dan elit. Aktor internal birokrasi pembuat kebijakan publik (pemerintah) seharusnya menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat dan elit dalam setiap kebijakan publik yang diambilnya. Akan tetapi dalam model ini mereka bukan sebagai abdi rakyat “*servant of the people*” tetapi lebih sebagai kepanjangan tangan dari elit yaitu kelompok-kelompok yang mapan (*The*

*Establishment*) (Islamy, 1986: 36) dalam . Hal ini disebabkan kebijakan publik ditentukan semata-mata oleh kelompok elit, sehingga aktor pembuat kebijakan publik (pemerintah) hanyalah sekedar pelaksana-pelaksana dari kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh elit.

Kebijakan publik seharusnya menggambarkan kepentingan/tuntutan rakyat, tetapi dalam model ini, rakyat bersikap apatis, dan buta terhadap informasi akibat tekanan dari elit, sehingga kelompok elit mampu membentuk dan mempengaruhi massa melalui kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan.

Elitisme menurut Thomas R. Dye (Islamy, 1986: 41) mempunyai arti bahwa kebijakan publik tidak begitu banyak mencerminkan keinginan rakyat tetapi keinginan elit. Perubahan dan pembaruan terhadap kebijakan publik terjadi hanya jika ada peristiwa-peristiwa yang mengancam sistem politik dan kedudukan elit. Tujuan perubahan kebijakan publik untuk melindungi sistem dan kedudukan elit. Elit menciptakan sistem sedemikian rupa sehingga massa sebagian besar menjadi pasif, apatis, dan buta informasi tentang kebijakan publik. Elit mempengaruhi massa dan bukan sebaliknya, komunikasi berjalan satu arah yaitu dari atas ke bawah. Massa sulit menguasai elit. Dan massa tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap perilaku elit yang membuat keputusan.

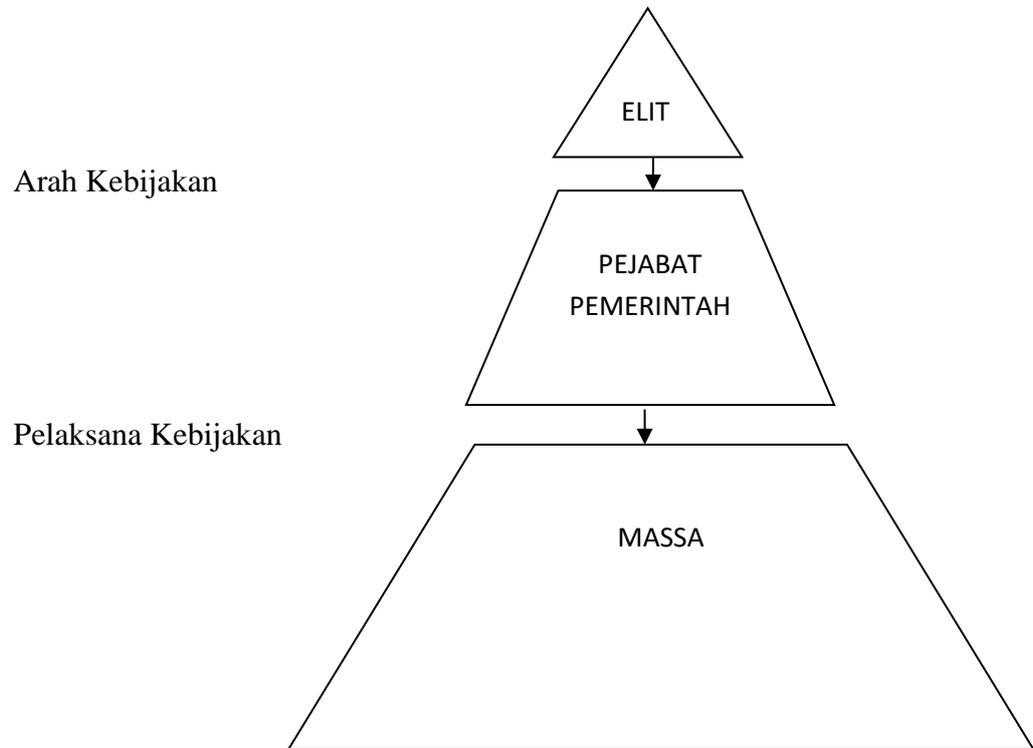
Irfan Islamy (1986: 40) menggambarkan kriteria-kriteria model elit-massa adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat dibagi menjadi dua yaitu kelompok kecil (golongan elit) yang mempunyai kekuasaan (penguasa) dan kelompok besar (golongan non-elit) yang tidak punya kekuasaan (dikuasai).

- 2) Kelompok elit yang berkuasa berbeda dengan kelompok non-elit yang dikuasai, karena kelompok elit terpilih berdasarkan keistimewaan yang dimiliki.
- 3) Perpindahan posisi/kedudukan dari non-elit ke elit akan dipersulit, kecuali non elit yang telah menerima consensus dasar golongan elit yang dapat masuk kedalam lingkaran penguasa.
- 4) Golongan elit menggunakan consensus tadi untuk mendukung nilai-nilai dasar dan system social dan untuk melindungi system tersebut. Consensus berdasarkan pada pengakuan milik-milik pribadi; status social, pemerintahan yang terbatas dan kebebasan individu.
- 5) Kebijakan publik tidak menggambarkan kepentingan publik melainkan kepentingan elit.
- 6) Golongan elit yang aktif relative sedikit sekali memperoleh pengaruh dari massa yang apatis/pasif. Elitlah yang mempengaruhi massa dan bukan massa yang mempengaruhi elit.

Model elit dapat dipahami melalui contoh pada masa Perancis dibawah kepemimpinan Louis XIV, terdapat kaum borjuis sebagai kelompok elit kebangsawanan. Elit ini yang menyusun kebijakan publik dan mempengaruhi Louis XIV untuk segera menetapkan, dimana kebijakan publik tersebut hanya memperhatikan kepentingan elit tersebut.

**Gambar 1.3**  
**Model Elit**



Sumber: Islamy, 1986; 41

### 1.6.3.2 Model Pluraris

Berkebalikan dengan model elit yang titik perhatiannya lebih bertumpu pada elit politik, maka model pluralis lebih percaya pada peran subsistem-subsistem yang berada dalam sistem demokrasi. Di Negara-negara berkembang model elitis akan cukup memadai untuk menjelaskan proses politik yang berlangsung, namun akan kesulitan dalam menjelaskan proses politik di negara yang mendasarkan pada sistem demokrasi, terlebih demokrasi pluralis seperti di Amerika Serikat.

Pandangan-pandangan pluralis disarikan oleh ilmuwan Robert Dahl dan David Truman. Pandangan pluralis dapat dirangkum dalam uraian berikut:

1. Kekuasaan merupakan atribut individu dalam hubungannya dengan individu-individu yang lain dalam proses pembuatan keputusan.
2. Hubungan-hubungan kekuasaan tidak perlu tetap berlangsung, namun hubungan-hubungan kekuasaan lebih dibentuk untuk keputusan-keputusan khusus. Setelah keputusan ini dibuat maka hubungan-hubungan kekuasaan tersebut tidak akan tampak, hubungan ini digantikan oleh seperangkat hubungan kekuasaan yang berbeda ketika keputusan selanjutnya hendak dibuat.
3. Tidak ada pembedaan yang tetap di antara “elit” dan “massa”. Individu-individu yang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dalam suatu waktu tidak dibuthkan oleh individu yang sama yang berpartisipasi dalam waktu yang lain. Individu masuk dan keluar dalam partisipasinya sebagai pembuat keputusan digolongkan menjadi aktif atau tidak aktif dalam politik.
4. Kepemimpinan bersifat cair dan mempunyai mobilitas yang tinggi, kekayaan merupakan asset dalam politik, tetapi hanya merupakan salah satu dari sekian banyak aset politik yang ada
5. Terdapat banyak pusat kekuasaan diantara komunitas. Tidak ada kelompok tunggal yang mendominasi pembuatan keputusan untuk semua masalah kebijakan.
6. Kompetisi dapat dianggap berada di antara pemimpin. Kebijakan publik lebih lanjut dipandang merefleksikan tawar-menawar atau kompromi yang dicapai di antara kompetisi pemimpin-pemimpin politik.

## 1.7 Pasar Tradisional

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 2007: Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Syarat-syarat pasar tradisional menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007, sebagai berikut :

- a. Aksesibilitas, yaitu kemungkinan pencapaian dari dan ke kawasan dalam kenyataannya ini berwujud jalan dan transportasi atau pengaturan lalu lintas.
- b. Kompatibilitas, yaitu keserasian dan keterpaduan antara kawasan yang menjadi lingkungannya,.
- c. Fleksibilitas, yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik atau pemekaran kawasan pasar dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana dan ekologis, yaitu keterpaduan antara tatanan kegiatan alam yang mewadahnya.

Berdasarkan Permendag No. 61 Tahun 2015 pasar tradisional diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pasar Tradisional Tipe A
2. Pasar Tradisional Tipe B

3. Pasar Tradisional Tipe C
4. Pasar Tradisional Tipe D

### **1.7.1 Revitalisasi Pasar Tradisional**

Revitalisasi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 Tahun 2010 tentang Revitalisasi Kawasan adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya. Menurut Danisworo dalam (Yuliani, 2016) pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan pula potensi yang ada di lingkungan sekitar seperti sejarah, makna, serta keunikan dan citra lokasi.

Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakat serta pengenalan budaya yang ada. Revitalisasi sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, terbagi menjadi beberapa tahapan meliputi :

#### **1. Intervensi Fisik**

Proses ini mengawali kegiatan revitalisasi fisik meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi bangunan, tata hijau, sistem penghubung, dan ruang terbuka. Isu lingkungan (*environmental sustainability*) pun menjadi penting, sehingga intervensi fisik semestinya memperhatikan konteks lingkungan. Perencanaan fisik tetap harus dilandasi pemikiran jangka panjang.

#### **2. Rehabilitasi Ekonomi**

Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (*local economic*

*development*), sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kawasan kota. Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (*vitalitas baru*).

### 3. Revitaliasi Sosial/Institusional

Revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik (*interesting*), bukan sekedar membuat *beautiful place*. Kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga (*public realms*). Kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan lingkungan sosial yang berjati diri (*place making*) dan perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik.

Program revitalisasi pasar tradisional merupakan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) yang mengamanatkan bahwa Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar tradisional guna meningkatkan daya saing dalam bentuk revitalisasi pasar tradisional; implementasi manajemen pengelolaan yang profesional; fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar tradisional. Maksud dan tujuan revitalisasi pasar tradisional adalah :

- a. Mendorong agar pasar tradisional lebih modern dan mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, sehingga dapat meningkatkan omset pedagang pasar tradisional.

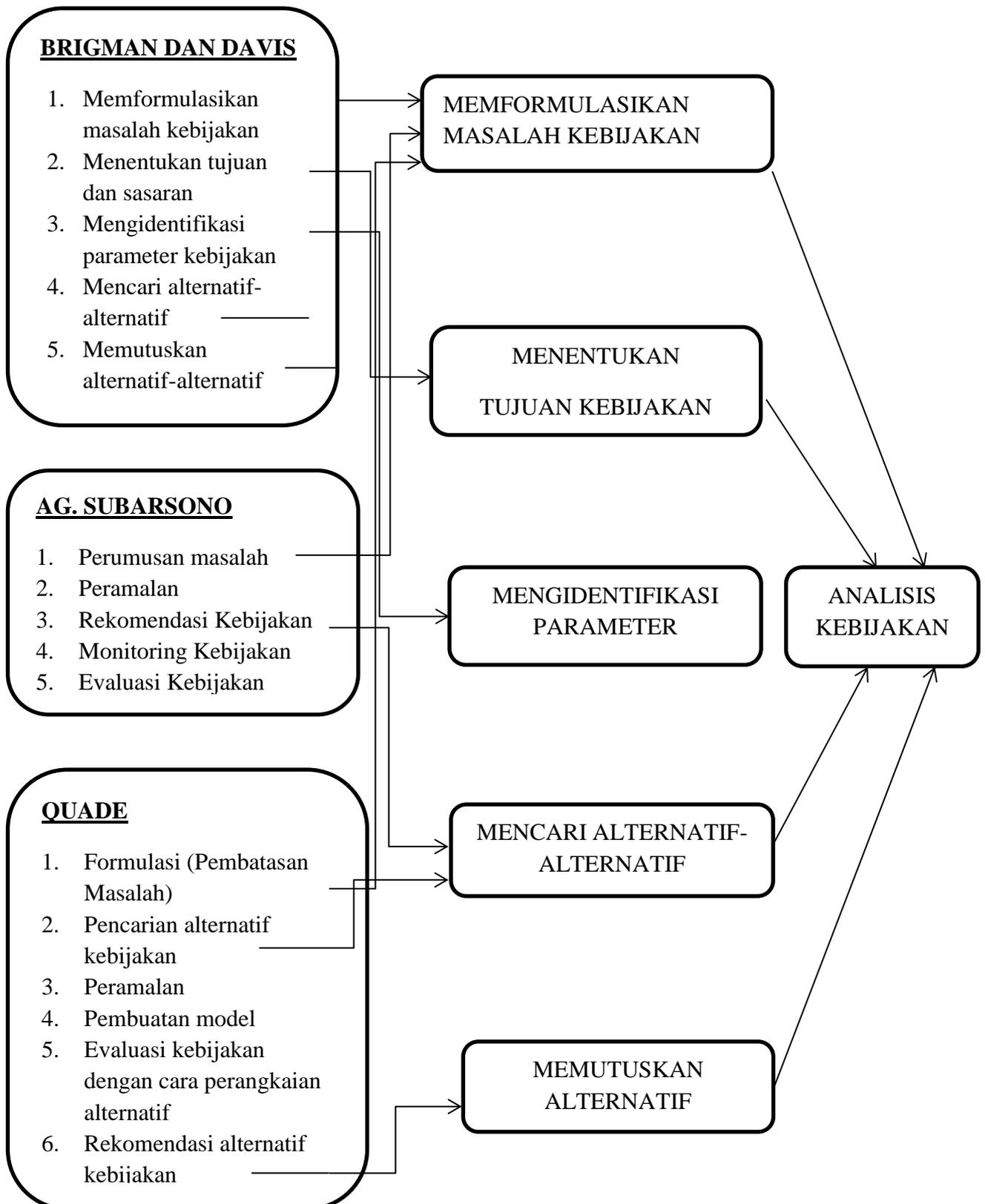
- b. Meningkatkan pelayanan dan akses yang lebih baik kepada masyarakat konsumen, sekaligus menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak perekonomian daerah.
- c. Mewujudkan pasar tradisional yang bermanajemen modern, lebih bersih, sehat, aman, segar, dan nyaman, sehingga dapat menjadi tujuan tetap belanja konsumen serta referensi dalam pembangunan pasar-pasar lainnya.

Konsep dan prinsip revitalisasi Pasar tradisional bukan hanya menyentuh perbaikan dari sisi perbaikan fisik saja. Berdasarkan Permendag No. 61 Tahun 2015 revitalisasi pasar tradisional meliputi :

- a. Revitalisasi fisik, yaitu upaya perbaikan dan peningkatan fisik pasar tradisional, baik dari segi luas maupun kualitas bangunan yang harus berpedoman pada standar fisik pasar tradisional atau sesuai desain prototipe, jenis dan komoditi yang diperdagangkan, sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan (K3L), serta kemudahan akses transportasi demi kenyamanan masyarakat dalam berbelanja.
- b. Revitalisasi manajemen, yaitu upaya perbaikan dan peningkatan profesionalisme dan fungsi pengelola, prosedur standar operasional, sistem monitoring, dan evaluasi untuk menciptakan pengelolaan pasar tradisional yang profesional, modern dan transparan.
- c. Revitalisasi sosial budaya, yaitu upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan dan antar pelaku pasar tradisional dengan konsumen untuk mewujudkan lingkungan pasar yang kondusif dan nyaman.

- d. Revitalisasi ekonomi, yaitu upaya perbaikan intermediasi hulu-hilir pasar tradisional melalui perubahan fungsi pasar tradisional sehingga terjadi peningkatan daya saing dan omset, keseimbangan permintaan dan penawaran, serta kestabilan harga yang memberikan efek gand di sektor produksi, kreatifitas produktif dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.

**Gambar 1.3**  
**Gambar Kerangka Pikir**



## **1.8 Operasionalisasi Konsep**

Berkaitan dengan kerangka pikir di atas maka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kerangka pikir analisis kebijakan dari *Brigman dan Davis* dengan didukung oleh kerangka pikir analisis kebijakan dari A.G. Subarsono dan Quade. Apabila dilihat dari kerangka berpikirnya, ketiga kerangka pikir di atas sebenarnya tidak jauh berbeda yaitu pada akhir analisis kebijakan memberikan rekomendasi kebijakan.

Hal ini juga berlaku dalam analisis kebijakan pengembangan pasar Bulu kota Semarang. Di dalam penelitian ini tahap analisis kebijakan yang ada adalah memformulasikan masalah kebijakan, menentukan tujuan dan sasaran, mengidentifikasi parameter kebijakan, mencari alternatif-alternatif, dan mencari alternatif pilihan.

Mengikuti rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian maka peneliti mengelompokkan tahapan analisis ini menjadi dua yaitu kelompok (1) Masalah kebijakan yang berisi memformulasikan masalah kebijakan, menentukan tujuan kebijakan dan mengidentifikasi masalah kebijakan serta kelompok (2) Perumusan kebijakan yang terdiri dari mencari alternatif-alternatif dan memutuskan alternatif kebijakan.. Adapun tahap analisis kebijakan pengembangan pasar Bulu di Kota Semarang sebagai berikut :

### **1.8.1 Masalah Kebijakan**

#### **1.8.1.1 Memformulasikan masalah kebijakan**

Menurut Brigman dan Davis hal ini merupakan langkah pertama. Memformulasikan masalah merupakan pekerjaan yang sangat prinsipil dan

krusial. Hal ini dikarenakan apabila dalam memformulasikan masalahnya salah maka akan dengan sendirinya kebijakan publik yang diterapkannya salah pula.

Masalah yang dihadapi dinas Perdagangan kota Semarang yaitu menurun yaitu diantaranya :

- a) Dilihat dari aspek fisik, pengelolaan pasar belum terselenggara dengan baik seperti kondisi pasar yang berbau tidak sedap, kotor, kumuh, talang di lantai dasar Pasar Bulu jebol mengakibatkan area parkir banjir saat hujan deras, dan atap lantai tiga yang bocor, kamar mandi umum yang terlihat kotor, serta beberapa fasilitas yang belum berfungsi dengan baik.
- b) Dilihat dari aspek ekonomi, pedagang belum merasakan keramaian pembeli terlebih-lebih pembeli yang berada pada ujung jalan pintu utama yang berdampak pada penurunan omset penjualan, berkurangnya jumlah pedagang pasar, serta kurangnya produk yang diperdagangkan di pasar. Dalam aspek ekonomi sangatlah terlihat kekurangannya apalagi setelah dilakukan revitalisasi, setelah revitalisasi dilakukan pasar Bulu nyatanya lebih sepi pengunjung dan banyak pedagang yang mulai berkurang berjualan dibandingkan sebelum dilakukannya revitalisasi.
- c) Dilihat dari aspek manajemen yaitu masih banyak pedagang yang berjualan di area parkir, zonasi pedagang yang kurang tepat, serta pelayanan pasar yang kurang optimal.
- d) Dilihat dari aspek sosial budaya yaitu belum terwujudnya kondisi pasar yang nyaman, serta masih rendahnya keikutsertaan pedagang dalam paguyuban

pedagang pasar Bulu sebagai wada kegiatan sosial dan inspirasi para pedagang.

#### **1.8.1.2 Menentukan tujuan kebijakan**

Tahapan ini akan sangat penting karena akan menentukan prioritas kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Merumuskan tujuan dan sasaran bukanlah hal yang mudah oleh karena berbagai kompleksitas masalah dan kepentingan. Namun, karena semua kebijakan publik ditujukan kepada peningkatan kualitas dan kesejahteraan umum maka dalam tataran umum semua tujuan dan sasaran harus diarahkan kepada terciptanya kesejahteraan sesuai dengan bidang-bidang kebijakannya.

Tujuan-tujuan yang menyebutkan dari berbagai permasalahan yang terjadi dalam pengembangan pasar Bulu kota Semarang diantaranya :

- a) Tujuan dari adanya kebijakan pasar tradisional “pasar Bulu” yaitu menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi; mewujudkan keterpaduan pengelolaan pasar secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang kota secara keberlanjutan; mewujudkan keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan perdagangan; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar.

- b) Dari segi aspek fisik, pengelolaan pasar dalam hal fasilitas perpasaran yang masih kurang dirasakan oleh para pedagang serta pengunjung pasar Bulu, ini belumlah sesuai dengan tujuan kebijakan pasar tradisional.
- c) Dari segi aspek ekonomi, penurunan omset penjualan akibat sepi pengunjung yang dirasakan pedagang belumlah sesuai dengan tujuan revitalisasi pasar tradisional.
- d) Dari segi aspek manajemen, jam operasional pasar yang ditetapkan pasar belum sesuai dengan ketentuan yang ada, masih banyak pedagang yang berjualan di area parkir yang seharusnya tidak diperbolehkan namun pelanggaran tetap dilakukan, zonasi pedagang yang kurang tepat yaitu dengan pengaturan blok-blok pedagang dirasa kurang tepat, serta pelayanan pasar yang kurang optimal.
- e) Dari segi aspek sosial budaya, kondisi pasar yang kurang nyaman belum sesuai dengan tujuan pengaturan pasar tradisional khususnya di pasar Bulu, dalam hal partisipasi yang diharapkan belum semua pedagang ikut serta dalam paguyuban pedagang pasar Bulu.

Setelah mengetahui berbagai tujuan yang telah ditetapkan maka langkah selanjutnya yaitu memprioritaskan kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan dalam permasalahan yang dialami dalam pembuatan kebijakan.

### **1.8.1.3 Mengidentifikasi parameter kebijakan**

Identifikasi parameter kebijakan digunakan untuk melakukan tes atau pengujian terhadap permasalahan yang akan terjadi dalam kebijakan pengembangan pasar Bulu. Untuk mengidentifikasi parameter-parameter

kebijakan maka dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Kriteria kelayakan teknis
  - a. Pencapaian apa yang diinginkan dari kebijakan pengembangan pasar Bulu.
  - b. Kemampuan memecahkan permasalahan dengan adanya kebijakan pengaturan pasar tradisional.
2. Kriteria kemungkinan ekonomi dan finansial
  - a. Perubahan kemampuan ekonomis masyarakat khususnya dengan adanya kebijakan pengembangan pasar Bulu.
  - b. Perolehan manfaat yang lebih tinggi dengan menggunakan sumber daya yang ada.
  - c. Kemungkinan keuntungan atau kerugian dengan melihat perbandingan antara merevitalisasi Pasar Bulu dan tidak merevitalisasi Pasar Bulu.
  - d. Pencapaian tujuan dengan biaya yang minimum.
3. Kriteria kelayakan politik.
  - a. Penerimaan aktor-aktor politik para klien dan aktor-aktor lainnya dalam masyarakat terhadap kebijakan pengembangan pasar Bulu.
  - b. Pertentangan nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat dengan kebijakan pengembangan pasar Bulu.
  - c. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan masyarakat dengan adanya kebijakan pengembangan pasar Bulu.

- d. Pertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan adanya kebijakan pengaturan pasar tradisional.
  - e. Pemerataan keadilan dalam masyarakat dengan adanya kebijakan pengembangan pasar Bulu.
4. Kriteria kelayakan administrasi
- a. Otoritas yang jelas bagi organisasi atau dinas yang diserahkan tugas untuk melaksanakan kebijakan pengembangan pasar Bulu untuk melakukan kerjasama dengan unit atau instansi lain dalam menentukan prioritas.
  - b. Realisasi kebijakan pengembangan pasar Bulu.
  - c. Kemampuan dalam konteks skill dari staff dan dalam konteks finansial dari organisasi atau dinas yang akan melaksanakan kebijakan pengembangan pasar Bulu.

## **1.8.2 Perumusan Alternatif**

### **1.8.2.1 Mencari alternatif-alternatif**

Tahapan ini membutuhkan penelitian yang serius dan mendalam. Tujuan penelitian ini pada pokoknya adalah untuk mengumoukan berbagai data-data informasi atau masalah yang relevan serta mengidentifikasi berbagai respon (tanggapan) yang mungkin dilakukan.

Untuk dapat menentukan alternatif-alternatif kebijakan dalam permasalahan pengembangan pasar Bulu adalah dengan mengamati gejala, yaitu alternatif-alternatif kebijakan yang muncul dalam pengembangan pasar Bulu. Serta memilih permasalahan yang sangat kompleks, yaitu dengan cara mempelajari kebijakan

pengembangan pasar tradisional “pasar Bulu” di kota lain, menerima masukan masukan dari informan untuk diolah menjadi sebuah kebijakan baru.

#### **1.8.2.2 Memutuskan alternatif-alternatif pilihan mana yang mungkin dan sebaiknya dilakukan**

Hal ini merupakan tahap akhir dalam analisis kebijakan. Memutuskan alternatif-alternatif pilihan merupakan proses akhir yang harus dilakukan setelah tahapan mencari alternatif kebijakan. Ini artinya bahwa produk-produk kebijakan adalah rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada pengambil keputusan. Rekomendasi kebijakan ini tentunya akan lebih baik jika lebih dari satu, agar pihak pengambil keputusan dapat menimbang hal mana yang akan diputuskan. Analisis secara lengkap dari masing-masing alternatif tentunya sangat diharapkan.

Dalam kebijakan pengembangan pasar Bulu maka harus diambil alternatif-alternatif yang memiliki nilai tertinggi dan memberikan dampak negatif yang terkecil. Alternatif tersebut berupa rekomendasi kebijakan yang dimana rekomendasi tersebut dapat dipakai untuk kebijakan pengembangan pasar Bulu.

### **1.9 Metode Penelitian**

#### **1.9.1. Desain Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini merupakan metode yang mengeksplorasi serta memahami makna sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan dengan melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif serta menafsirkan makna data

(Creswell, 2014:4). Selanjutnya, Pasolong dalam Metode Penelitian Administrasi Publik (2012 :75) menjelaskan beberapa tipe penelitian. Adapun beberapa tipe penelitian tersebut adalah :

a. Penelitian Deskriptif (Penggambaran)

Merupakan suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat dilakukannya penelitian. Upaya dalam penelitian penggambaran ini adalah mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini. penelitian ini tidak berusaha untuk menganalisis hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya secara objektif.

b. Penelitian Eksploratif (Penjajakan)

Merupakan suatu penelitian yang sifatnya terbuka, serta masih mencari-cari dan belum memiliki hipotesa, pengetahuan penelitian tentang gejala yang ingin diteliti masih kurang, sehingga penelitian penjajakan ini sering dilakukan sebagai langkah pertama untuk penelitian penjelasan maupun penelitian deskriptif. Melalui eksploratif tersebut masalah penelitian dapat dirumuskan dengan lebih jelas dan lebih terperinci.

c. Penelitian Eksplanatory (Penjelasan)

Merupakan suatu penelitian yang menyoroti hubungan antara variable variable penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan, oleh karena itu dinamakan penelitian pengujian hipotesa yang telah dirumuskan atau *testing research*.

Berdasarkan Tipe Penelitian yang telah dipaparkan di atas, dalam penelitian ini Peneliti akan menggunakan tipe penelitian deskriptif, sehingga desain penelitian yang dipilih adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Desain ini dipilih karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis Pengembangan Pasar Bulu Kota Semarang berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan dibatasi waktu serta pengumpulan informasi secara lengkap dengan prosedur pengumpulan data yang telah ditetapkan.

### **1.9.2. Situs Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu Analisis Kebijakan Pengembangan Pasar Bulu Kota Semarang berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional, maka Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Semarang, khususnya di: Dinas Perdagangan Kota Semarang, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Wilayah Bulu dan Pasar Bulu Kota Semarang.

### **1.9.3. Subjek Penelitian**

Subjek Penelitian merupakan entitas yang mempengaruhi desain riset, pengumpulan data, dan keputusan analisis data, untuk itu dibutuhkan subjek penelitian yang kredibel.

Dalam Penelitian Kualitatif, Peneliti adalah instrument atau alat penelitian yang utama. Kedudukan Peneliti yang seperti ini disebut sebagai *Human Instrument*. Sebagai Human Instrument, Peneliti berfungsi untuk menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya Sugiyono, (2009 : 222).

Informan merupakan orang yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian kualitatif ini tidak dapat ditetapkan secara mutlak, maka teknik pemilihan informan ini menggunakan system *Purposive Sampling* yakni dengan memilih infoman yang didasarkan pada tujuan tertentu. Untuk menganalisa lebih lanjut digunakan system *Snowball Sampling*, yakni pemilihan informan yang terus berkembang jumlahnya hingga informasi dan data yang diperoleh dirasa cukup Pasolong, (2012 : 161-162).

Peneliti Kualitatif memilih satu *key informant* yang nantinya *key informant* tersebut akan menunjuk informan selanjutnya guna memperoleh informasi yang lebih dalam. Informan dalam penelitian ini, yakni :

1. Kepala Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar
2. Kepala Bidang Pendapatan
3. Kepala UPTD Pasar Wilayah Bulu
4. Kepala Pasar Bulu
5. Ketua Paguyuban Pedagang dan Jasa Pasar Bulu
6. Wakil KSM Kebersihan Pasar Bulu
7. Pedagang Pasar Bulu
8. Pengunjung di Pasar Bulu

#### **1.9.4. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

#### a. Sumber Data Primer

Pasolong (2012:70) menjelaskan data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya, Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. Dalam Penelitian ini Data Primer yang digunakan oleh Peneliti adalah Data yang didapat dari Hasil Wawancara dan hasil Observasi di Lapangan yang didapat oleh Peneliti selama proses pengumpulan data. Dalam Penelitian ini, Sumber data berupa hasil wawancara didapatkan dari beberapa informan yang ditemui peneliti secara langsung. Adapun informan tersebut antara lain :

1. Kepala Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar
2. Kepala Bidang Pendapatan
3. Kepala UPTD Pasar Wilayah Bulu
4. Kepala Pasar Bulu
5. Ketua Paguyuban Pedagang Jasa Pasar Bulu
6. Pedagang Pasar Bulu
7. Pengunjung di Pasar Bulu

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka atau bahan informasi lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Bentuk dari data sekunder ini berupa catatan-catatan, buku-buku literature, dokumen, laporan, serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, Data Sekunder yang digunakan berupa buku yang memuat pengetahuan tentang administrasi publik, efektivitas, metode penelitian, hasil penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal mengenai revitalisasi pasar

tradisional, dokumen seperti profil Pasar Bulu, rekapitulasi pedagang pasar Bulu, dan berita seputar pasar Bulu Kota Semarang.

#### **1.9.5. Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono (2010:401) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan gabungan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

##### **a. Wawancara**

*Esterberg* dalam (Sugiyono, 2010:410) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan melakukan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

##### **b. Dokumentasi**

Sugiyono (2010:422) menjelaskan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan bentuknya berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya patung, film, gambar, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan

wawancara dalam penelitian kualitatif karena tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Dokumentasi yang digunakan peneliti berupa foto dan gambar revitalisasi pasar Bulu Kota Semarang.

#### **1.9.6. Teknik Analisis Data**

*Rossmann dan Rallis* (Creswell, 2014:274) menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membuahkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi.

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi obyek penelitian, kemudian membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. selanjutnya peneliti harus membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data.

Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan.

Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

### **1.9.6.1. Reduksi Data**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti melakukan proses pemilihan, perangkuman hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema serta polanya. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya. Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevan yang telah didapatkan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data yang didapatkan akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan yang dituju sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

### **1.9.6.2. Penyajian Data**

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart* dan sejenisnya. Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2010: 249) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Penyajian data yang digunakan oleh peneliti berupa uraian singkat, bagan, grafik, tabel dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### **1.9.6.3. Menarik Kesimpulan**

Penelitian kualitatif menurut *Miles* dan *Huberman* dalam Sugiyono, (2010:252) kegiatan analisis ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa penarikan kesimpulan akhir setelah melakukan kesimpulan awal, karena kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan mengalami perubahan ketika ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya sesuai dengan topik penelitian. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.

Teknik analisis data yang digunakan juga dalam penelitian ini adalah penilaian alternatif terbaik. *Interview Guide* dirancang sebagai tuntutan praktis untuk persiapan dan evaluasi diri paper isu kebijakan. Pertanyaan-pertanyaan dalam daftar yang dimuat didasarkan pada pedoman penyusunan paper isu kebijakan yang telah disajikan dalam kerangka teori dan operasionalisasi konsep. Daftar ini merinci skala nilai yang dibuat untuk mendapat interpretasi data terbaik.

Penilaian alternatif yang digunakan adalah dengan menggunakan skor dan bobot, sehingga memunculkan alternatif kebijakan terbaik dari semua alternatif yang ditawarkan oleh peneliti. Alternatif kebijakan yang digunakan mengikuti parameter kebijakan, adapun parameter kebijakan yaitu :

1. Kelayakan teknis
2. Segi ekonomi dan finansial
3. Kelayakan politik, dan
4. Administrasi.

Adapun contoh penilaian alternatif kebijakan dapat dilihat dalam matrik di bawah:

**Tabel 1.5**

**Analisis Kebijakan Pasar Bulu Kota Semarang Berdasarkan Perda Nomor 9  
Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional  
MATRIKS PERHITUNGAN ALTERNATIF KEBIJAKAN**

No.	Alternatif	Parameter					Jumlah
		Teknis	Ekonomi	Finansial	Politik	Administrasi	
1.	Alternatif 1						
2.	Alternatif 2						
3.	Alternatif 3						
4.	Alternatif 4						

Skor :

4 : sangat memadai

3 : Memadai

2 : Kurang Memadai

1 : Tidak Memadai

### **1.9.7. Kualitas Data**

Creswell (2014:286) menjelaskan bahwa validitas data merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Validitas didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian

sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum. Adapun strategi validitas data yang dikemukakan oleh Creswell adalah sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema.
- b. Menerapkan *Member Checking* dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah laporan sudah akurat.
- c. Membuat deskripsi yang kaya dan padat tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus berhasil menggambarkan setting penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan.
- d. Mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti dalam penelitian dengan melakukan refleksi diri terhadap kemungkinan munculnya bias dalam penelitian, peneliti akan mampu membuat narasi yang terbuka dan jujur.
- e. Menyajikan informasi yang berbeda atau negative yang dapat memberikan perlawanan pada tema-tema tertentu. Peneliti dapat melakukan ini dengan membahas bukti mengenai suatu tema.
- f. Melakukan Tanya jawab dengan sesama rekan peneliti guna meningkatkan keakuratan hasil penelitian. Proses ini mengharuskan peneliti mencari seorang rekan yang data mereview untuk berdiskusi mengenai penelitian kualitatif.

- g. Mengajak seorang auditor untuk mereview kembali seluruh proyek penelitian. Dalam penelitian ini teknik validitas data yang digunakan peneliti adalah Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menganalisa dari berbagai perspektif. Teknik triangulasi lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik.

Uji keabsahan melalui triangulasi dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Begitu pula materi kebenaran tidak uji berdasarkan kebenaran alat sehingga substansi kebenaran dianggap benar apabila tergantung pada kebenaran intersubjektif. Oleh karena itu, sesuatu yang dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran *stakeholder*.

*Denzin* dalam Bungin, (2012: 257-259), membedakan empat macam triangulasi untuk menguji keabsahan hasil penelitian yaitu:

- a. Triangulasi Kejujuran Peneliti

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan dengan meminta bantuan peneliti lain melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang sama di lapangan.

- b. Triangulasi dengan Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda.

c. Triangulasi Metode

Triangulasi ini dilakukan dengan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode *interview* sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di-*interview*. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di-*interview* dan diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda.

d. Triangulasi dengan Teori

Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyetarakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembandingan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data. Triangulasi sumber sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Alasan penulis menggunakan triangulasi sumber data disebabkan metode tersebut dapat menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan.